



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS SENI DAN BUDAYA DI DESA SINGAPADU
TENGAH**

Komang Sarining¹, I Wayan Astawa², I Nyoman Suargita³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai, E-mail: komang.sarining@unr.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai, E-mail: astawa261@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai, E-mail: suargita@gmail.com

Abstract

Central Singapadu Village in Gianyar Regency is a designated tourism village, officially recognized through Gianyar Regent Decree No. 429/E-02/2017, for its preservation of local arts and culture. Guided by the Tri Hita Karana philosophy, the village promotes harmony between humans, nature, and the divine. While the development of art and culture-based tourism has adopted collaborative governance principles, its implementation remains suboptimal. Based on Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance Theory, initial collaboration was marked by face-to-face dialogue involving stakeholders such as the village government, tourism office, Pokdarwis (Tourism Awareness Group), and the community. The village government supports Pokdarwis through its roles as facilitator, educator, representative, and technical implementer. Despite shared commitments to community training and business development, challenges persist due to limited infrastructure, insufficient human resources, and lack of public awareness regarding Pokdarwis programs. Although initiatives such as traditional house villages, historical temples, and cultural activities are in place, their impact remains limited. Supporting factors include strong communication and cooperation between key actors, while inhibiting factors involve low community participation, limited funding, and inadequate human capital quality.

Keywords: *Tourism village, collaborative governance, Pokdarwis, arts and culture, Tri Hita Karana*

Abstrak

Desa Singapadu Tengah di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu desa wisata yang mempertahankan seni dan budaya lokal, ditetapkan melalui SK Bupati Gianyar No. 429/E-02/2017. Berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, desa ini mengedepankan harmoni antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Pengembangan pariwisata berbasis seni dan budaya telah menerapkan prinsip collaborative governance, namun implementasinya belum optimal. Berdasarkan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), kolaborasi awal ditandai dengan dialog langsung antara pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, Dinas Pariwisata, Pokdarwis,

dan masyarakat. Pemerintah desa mendukung peran Pokdarwis melalui fasilitasi, edukasi, representasi, dan teknis. Meski ada komitmen bersama dalam pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat, pelaksanaan belum maksimal akibat keterbatasan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program Pokdarwis juga menjadi tantangan, meskipun telah dilakukan pelatihan dan penyediaan fasilitas seperti tempat sampah dan pemandu wisata. Faktor pendukung utama adalah komunikasi yang baik antarpihak, sedangkan hambatan utamanya mencakup partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan anggaran, serta kualitas SDM yang belum memadai.

Kata kunci: Desa wisata, *collaborative governance*, Pokdarwis, seni dan budaya, Tri Hita Karana

A. PENDAHULUAN

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama melalui kolaborasi antara lembaga publik dengan aktor non-pemerintah. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* adalah suatu bentuk pemerintahan yang melibatkan badan publik dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berbasis musyawarah mufakat, serta berbagi peran dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan program maupun aset publik. Dalam praktik pemerintahan modern, kolaborasi antar aktor menjadi kebutuhan yang semakin penting (Sambodo, 2016). Abidin dkk (2016) mengidentifikasi tiga aktor utama dalam tata kelola pemerintahan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

Provinsi Bali menetapkan pariwisata budaya sebagai identitas utama melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, yang berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana, yaitu harmoni antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Kabupaten Gianyar yang memiliki luas 368 km² dikenal sebagai pusat seni dan budaya di Bali, dengan daerah-daerah seperti Sukawati, Ubud, dan Blahbatuh yang melahirkan banyak seniman. Desa Batubulan dan Desa Singapadu, khususnya, dikenal sebagai sentra seni pahat batu dan kerajinan tradisional.

Desa Singapadu Tengah di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai desa wisata melalui SK Bupati Gianyar No. 429/E-02/2017. Desa ini memiliki beragam potensi wisata berbasis seni, budaya, dan alam, seperti situs sejarah Kebo Iwa di Pura Dalem, yang memiliki peninggalan candi tebing dan goa petirtan yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Namun, pengelolaan dan pengembangan potensi

tersebut belum optimal. Beberapa kendala utama antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya promosi desa wisata, kurangnya infrastruktur pendukung (seperti toilet, tempat parkir, dan keamanan), serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan edukasi yang berkelanjutan.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan mengembangkan potensi wisata desa. Meskipun Pokdarwis Desa Singapadu Tengah telah menyusun program-program wisata seperti perkampungan rumah tradisional, pura bersejarah, dan kegiatan budaya, implementasinya belum maksimal. Hal ini diperparah dengan turunnya angka kunjungan wisatawan, kurangnya penjagaan di tempat wisata, dan minimnya edukasi masyarakat terkait pentingnya peran mereka dalam pengembangan pariwisata.

Kolaborasi telah dilakukan antara pemerintah desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, serta institusi pendidikan tinggi melalui Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), namun penerapan model collaborative governance masih menghadapi tantangan serius di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang lebih sinergis dan berkelanjutan agar pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan dan budaya.

Program pokdarwis di desa Singapadu Tengah yang mendukung pengembangan pembangunan pariwisata di Desa Singapadu Tengah dengan konsep *collaborative governance* yang dapat dikategorikan ke dalam tiga daya tarik yaitu perkampungan rumah tradisional, pura bersejarah (*temple heritage*) yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Program Pokdarwis Desa Singapadu Tengah

No	Daya Tarik	Program
1.	Perkampungan rumah tradisional	1. Pembangunan masterplan 2. Penataan obyek wisata
2	Pura bersejarah (<i>temple heritage</i>)	1. Penataan tempat suci 2. Penataan wisata spiritual 3. Pelestarian bangunan atau obyek wisata yang bernilai sejarah pada situs Kebo Iwa

3.	Aktivitas budaya	1. Pengembangan seni patung 2. Pengembangan seni tari
----	------------------	--

Sumber: Pokdarwis Desa Singapadu Tengah (2023)

Berdasarkan Tabel 1.31 menunjukkan bahwa pokdarwis memiliki 7 (tujuh) program yang terbagi ke dalam 3 (tiga) daya tarik program pariwisata. Pelaksanaan program sudah sampai pada tahap pembangunan masterplan, paket wisata serta penataan pada beberapa objek wisata seperti penataan tempat suci, penataan tempat wisata spiritual. Pelaksanaan program ini dapat mendukung pelestarian bangunan atau obyek wisata yang bernilai sejarah pada situs Kebo Iwa dan beberapa potensi wisata yang ada.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan pelaksanaan program pokdarwis Desa Singapadu Tengah yang belum maksimal serta adanya kendala dalam pelaksanaannya maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Seni Dan Budaya Di Desa Singapadu Tengah”

B. LITERATURE REVIEW

Dalam konteks pengembangan desa wisata, beberapa studi menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Herlambang, dkk (2023) menemukan bahwa di Desa Wisata Karangsalam, implementasi *collaborative governance* belum maksimal akibat ego sektoral dan rendahnya kualitas SDM. Penelitian serupa oleh Nurwanda, dkk (2024) di Kabupaten Ciamis juga menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan antar aktor menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif.

Studi oleh Puji, dkk (2024) di Desa Besani, yang mengembangkan desa wisata akulturasi Jawa-Tionghoa, berhasil menunjukkan bagaimana dukungan lintas sektor mampu mempercepat pertumbuhan destinasi wisata baru dengan kolaborasi aktif antar pihak. Sementara itu, penelitian di Desa Gubugklakah, Kabupaten Malang, menekankan pentingnya komunikasi tatap muka yang intensif dan desain institusional yang mendukung sebagai fondasi kolaborasi yang efektif.

Dalam konteks Bali, Dewi, dkk (2023) melalui studi di Desa Wisata Sangeh menyoroiti bagaimana penerapan prinsip Tri Hita Karana memperkuat dinamika kolaborasi

dalam membangun desa wisata berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif.

Dari tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kolaborasi lintas sektor memiliki potensi besar dalam mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas komunikasi, kepercayaan, desain kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis seni dan budaya di Desa Singapadu Tengah dengan menggunakan Teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008: 544) menjabarkan lima indikator Syaitu:

1. *Face-to-Face Dialogue*. Kolaborasi dibangun dengan dialog tatap muka antar aktor. Karena kolaborasi sendiri termasuk *consensus-oriented*, maka *thick communication* atau *face to face dialogue* diperlukan guna mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama.
2. *Trust Building*. Membangun kepercayaan antar aktor bukanlah fase berbeda dari fase pertama mengenai *face to face dialogue*. Namun, pemimpin yang baik pasti dapat memahami pentingnya kepercayaan antaraktor sebelum para aktor memanipulasi keadaan.
3. *Commitment to the Process* Komitmen berkaitan erat dengan keberhasilan kolaborasi, komitmenlah yang mempengaruhi motivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi.
4. *Shared Understanding* Maksud dari *shared understanding* di sini adalah kesamaan misi, kesamaan tujuan, kejelasan tujuan, hingga kesamaan ideologi.
5. *Intermediate Outcomes* Kolaborasi dapat terjadi apabila tujuan dari kolaborasi tersebut adalah *reachable*, keuntungan yang akan didapat dengan berkolaborasi jelas adanya, serta adanya *small wins* atau kemenangan-kemenangan kecil.

C. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berbasis seni dan budaya di Desa Singapadu Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara komprehensif dan kontekstual berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para pelaku di lapangan. Menurut Moleong (2015:6), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami

fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan menjabarkan data dalam bentuk deskriptif naratif, bukan angka atau statistik.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemaparan fakta dan data empiris untuk menjelaskan bagaimana proses collaborative governance berjalan dalam konteks pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) sebagai pisau analisis yang mencakup empat tahapan utama: face to face dialogue, trust building, commitment to process, dan shared understanding.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi langsung terhadap objek dan aktivitas wisata di Desa Singapadu Tengah.
2. Wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti aparat desa, pengurus Pokdarwis, Dinas Pariwisata, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
3. Studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi seperti SK Desa Wisata, laporan program Pokdarwis, dan dokumen perencanaan pariwisata desa.
4. Penelusuran online untuk melengkapi data sekunder melalui sumber daring resmi dan relevan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang (iteratif) hingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran mendalam mengenai praktik collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis seni dan budaya di Desa Singapadu Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis seni dan budaya di Desa Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan kerangka teori dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah diterapkan antara pemerintah

desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku usaha, namun pelaksanaannya belum optimal di seluruh tahapan proses kolaborasi.

Pada tahap *face to face dialogue*, kolaborasi dibangun melalui pertemuan langsung dalam bentuk forum musyawarah. Pemerintah desa memfasilitasi pertemuan dengan Pokdarwis dan masyarakat untuk menyusun program wisata. Namun, komunikasi ini masih terbatas pada isu dasar seperti kebersihan lingkungan dan belum menyentuh pengembangan infrastruktur wisata seperti homestay atau villa.

Tahap *trust building* menunjukkan bahwa kepercayaan antara pihak-pihak terkait mulai terbangun melalui pendekatan dialogis dan pemberian pelatihan. Pokdarwis memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik dengan menjalankan fungsi sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pelaksana teknis. Keberhasilan dalam membangun kepercayaan sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa dan keterlibatan aktif masyarakat.

Pada tahap *commitment to the process*, terdapat komitmen formal dari pemerintah daerah melalui penetapan regulatif Desa Singapadu Tengah sebagai desa wisata. Komitmen ini tercermin dalam upaya pelatihan, pembinaan, dan penyusunan program Pokdarwis. Namun, pelaksanaan belum maksimal karena keterbatasan anggaran, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengembangan wisata.

Tahap *shared understanding* belum menunjukkan hasil yang optimal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya peran aktif dalam pengembangan pariwisata. Evaluasi dan sosialisasi masih bersifat terbatas. Kurangnya interaksi yang berkelanjutan antara stakeholder menjadi hambatan dalam membentuk pemahaman bersama terhadap tujuan dan manfaat kolaborasi.

Pada tahap *intermediate outcomes*, program-program Pokdarwis yang meliputi perkampungan rumah tradisional, pura bersejarah, dan kegiatan budaya telah dijalankan, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan. Meskipun terdapat kemajuan seperti penyusunan masterplan dan penataan objek wisata, manfaat ekonomi dan pelestarian budaya belum terasa secara luas.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan *collaborative governance* antara lain adalah komunikasi yang baik antar aktor, komitmen pemerintah, dan struktur kelembagaan

Pokdarwis yang aktif. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran pengembangan, serta kurangnya kapasitas SDM lokal.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan Alamsyah (2019) yang menyatakan pentingnya dialog dan pelatihan dalam membangun kolaborasi wisata edukatif, serta sejalan dengan Putra (2020) dan Akbar dkk (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh komitmen, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah. Dalam konteks Desa Singapadu Tengah, keberhasilan kolaborasi bergantung pada kemampuan untuk memperkuat peran Pokdarwis, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan sarana pendukung dan pendanaan yang memadai.

Dengan demikian, *collaborative governance* di Desa Singapadu Tengah telah berjalan pada tingkat dasar, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek partisipasi, koordinasi antar lembaga, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan pariwisata berbasis seni dan budaya yang berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis seni dan budaya di Desa Singapadu Tengah telah berlangsung, namun belum secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Pokdarwis, dan masyarakat telah terbentuk melalui tahapan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pembentukan pemahaman bersama. Pokdarwis memainkan peran strategis dalam menjalankan fungsi fasilitator, edukatif, representatif, dan teknis dalam mendukung program pariwisata desa. Namun demikian, implementasi kolaborasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran pengembangan, serta kurangnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Program-program Pokdarwis, meskipun telah dijalankan, belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata sangat bergantung pada penguatan partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan

infrastruktur dan pembiayaan yang memadai. Untuk itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antar aktor untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal di Desa Singapadu Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, et al. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Konsep, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akbar, Muhammad, Nur Hidayat, and Deni Supriyono. 2022. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang." *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1): 12–23.
- Alamsyah. 2019. *Collaborative Governance Dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4): 543–571.
- Arianto, Y. 2018. *Manajemen Sarana dan Prasarana Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Luh Gede Eka, I Gede Supriyono, and I Made Utama. 2023. "The Dynamics of Collaboration as an Effort to Develop a Sustainable Tourist Village in Sangeh." *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(1): 17–27.
- Kotter, John P. 2019. *Leading Change: Why Transformation Efforts Fail*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Mafaza, Rani Nurfajrina. 2020. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada Program Balai Ekonomi Desa di Desa Borobudur)*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Matthoriq, Mohammad Rijal. 2021. *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa Bumiaji Agrotourism di Kota Wisata Batu)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi. 2019. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, Aditya Bima. 2020. *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Studi Kasus BUMDes Maju Mandiri dan Pokdarwis Bejiharjo, Gunungkidul)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putrawan, I Gede Made. 2019. “Penguatan Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.” *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(2): 102–115.
- Suarabali.id. 2023. “Desa Batubulan dan Desa Singapadu, Pusat Seni Pahat di Gianyar.” <https://suarabali.id> (accessed June 30, 2023).
- Yahya, M. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Prenadamedia Group.